



LAPORAN KUNJUNGA KERJA PANJA EKONOMI BIRU

KE SORONG DAN RAJA AMPAT PAPUA BARAT DAYA

11-15 NOVEMBER 2025

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
2025



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA EKONOMI BIRU

KE SORONG DAN RAJA AMPAT PAPUA BARAT DAYA

11 - 15 November 2025



**LAPORAN KEGIATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA EKONOMI BIRU
KE SORONG DAN RAJA AMPAT, PAPUA BARAT DAYA
11-15 November 2025**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kelautan dan maritim Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap ekosistem laut, ketimpangan manfaat ekonomi di wilayah pesisir, hingga tuntutan global terhadap praktik pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pendekatan ekonomi biru menjadi salah satu kerangka strategis yang relevan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara normatif, prinsip ekonomi biru telah diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menegaskan bahwa pengelolaan kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengedepankan prinsip ekonomi biru. Namun demikian, implementasi prinsip tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal tata kelola kawasan konservasi, pembiayaan berkelanjutan, serta integrasi peran pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha lokal.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Ekonomi Biru sebagai instrumen parlemen untuk memperkuat diplomasi lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan nasional serta komitmen internasional Indonesia di bidang kelautan memiliki dampak nyata di tingkat daerah. Panja Ekonomi Biru juga dimaksudkan untuk menjembatani perspektif global dan nasional dengan praktik terbaik di daerah, sehingga proses perumusan kebijakan dapat berpijak pada pengalaman empiris dan kebutuhan riil masyarakat pesisir.

Kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan ekonomi biru di

kawasan dengan nilai ekologis dan sosial yang strategis. Raja Ampat dikenal luas sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang berada di wilayah Coral Triangle, sekaligus menjadi contoh bagaimana konservasi laut dapat dikaitkan dengan pengembangan pariwisata bahari dan ekonomi berbasis masyarakat. Sementara itu, Sorong berperan sebagai pintu gerbang utama kawasan serta simpul penting dalam tata kelola maritim dan pesisir di Papua Barat Daya.

Melalui kunjungan ini, Panja Ekonomi Biru menaruh perhatian khusus pada beberapa aspek utama, antara lain pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis komunitas dan kearifan lokal, pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, serta inovasi pembiayaan konservasi melalui mekanisme retribusi wisata dan skema pendanaan berbasis hasil. Praktik-praktik seperti pengelolaan *homestay* berbasis masyarakat, peran koperasi nelayan dan pelaku usaha lokal, serta sistem konservasi adat seperti Egek Laut menjadi sumber pembelajaran penting dalam melihat bagaimana ekonomi dan ekologi dapat berjalan secara berimbang.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan masukan substantif bagi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan nasional yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, temuan lapangan dari Sorong dan Raja Ampat juga diharapkan memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia dalam mempromosikan praktik ekonomi biru yang berakar pada kearifan lokal, berpihak pada masyarakat, dan sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 69 ayat (2) yang mengatur peran diplomasi parlemen dalam mendukung politik luar negeri Indonesia dan Pasal 116 ayat (1) yang memberi mandat pada BKSAP DPR RI untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.
2. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 yang mengatur fungsi BKSAP sebagai alat kelengkapan dewan dalam diplomasi antar parlemen.

C. SUSUNAN DELEGASI

Susunan dan komposisi Delegasi BKSAP DPR RI pada Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama/No Anggota	Jabatan
1.	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. A-447 / F-PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	Robert Joppy Kardinal, S.A.B. A-365 / F-P.Golkar	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
3.	Faujia Helga Br. Tampubolon A-579 / F-P.Demokrat	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman empiris mengenai penerapan prinsip ekonomi biru di kawasan pesisir dan laut yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi strategis, sebagai dasar penguatan peran parlemen dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan diplomasi lingkungan.

Adapun agenda ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menggali praktik terbaik (best practices) penerapan ekonomi biru di tingkat daerah, khususnya dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, pariwisata bahari berkelanjutan, dan ekonomi berbasis masyarakat.
2. Memahami tata kelola dan mekanisme pembiayaan berkelanjutan di kawasan konservasi laut, termasuk pengelolaan retribusi wisata, peran BLUD-UPTD, serta potensi pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dan kemitraan multi-pihak.
3. Menelaah peran dan keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, termasuk integrasi kearifan lokal dalam kebijakan konservasi dan ekonomi biru.
4. Mengidentifikasi tantangan implementasi kebijakan ekonomi biru di lapangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, maupun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Memperkuat sinergi pusat–daerah dalam pengelolaan kelautan dan maritim, melalui dialog langsung dengan pemerintah daerah, lembaga teknis, serta pelaku usaha dan komunitas pesisir.

6. Menghimpun masukan substantif sebagai bahan penyusunan rekomendasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI, agar kebijakan nasional lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis praktik nyata di daerah.
7. Mendukung peran diplomasi parlemen Indonesia dalam isu kelautan dan pembangunan berkelanjutan, dengan menjadikan pengalaman Sorong dan Raja Ampat sebagai referensi dalam forum kerja sama antarparlemen dan internasional.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025, telah dilakukan serangkaian kegiatan baik dari segi teknis maupun substansi. Dari sisi teknis, sekretariat telah melaksanakan koordinasi dengan International Conservation Caucus Foundation (The ICCF Group) dan para pihak terkait. Dari sisi substansi, Tenaga Ahli telah menyusun materi berupa naskah sambutan dan paparan Ketua BKSAP yang sekaligus merupakan Ketua Delegasi , serta usulan butir wicara untuk para Anggota Delegasi.

II. LAPORAN KEGIATAN

A. AGENDA DELEGASI

Kegiatan ini dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan	Keterangan
11 November 2025 (Sorong)		
10.00	Rapat Persiapan	
12 November 2025 (Malaumkarta, Sorong Selatan)		
08.30 – 10.00 (1 hr 30 m)	Perjalanan menuju Malaumkarta	±45–60 menit dari hotel ke Distrik Makbon, Sorong
10.00 – 12.00 (2 hr)	Kunjungan Lapangan: OECM Malaumkarta	<p>Agenda: Penyambutan adat. Diskusi mengenai pengelolaan laut berbasis adat “Egek Laut” & integrasi perlindungan hutan-laut</p> <p>Catatan Kontekstual: Kampung Malaumkarta merupakan desa adat dari Suku Moi, salah satu masyarakat adat utama di Papua Barat Daya.</p>
14.30 – 15.30 (1 hr)	Kunjungan Lapangan: Fasilitas Pengumpulan Udang KOBUMI (Usaha Mina)	<p>Agenda: Kunjungan ke fasilitas pengumpulan hasil perikanan rakyat oleh Koperasi FGAN Fen Sisi (KOBUMI), model ekonomi biru berbasis masyarakat di Sorong Selatan.</p> <p>Catatan Kontekstual: <u>KOBUMI</u> didirikan oleh komunitas pesisir untuk memperkuat perdagangan hasil laut yang berkeadilan dan ramah lingkungan.</p> <p>Tempat: <u>KOBUMI Warehouse</u></p>
17.00 – 20.00 (3 hr)	Makan malam bersama Gubernur Papua Barat Daya	<u>Marina Star Restaurant</u>
13 November 2025 (Waisai-Raja Ampat)		
09.00 – 09.15 (15 m)	Perjalanan dari hotel menuju Pelabuhan Usaha Mina	
09.15 – 10.00 (45 m)	Pelayaran Sorong - Waisai	Kapal cepat (± 2 jam)

10.30 – 11.00 (30 m)	Perjalanan ke Kantor BLUD-UPTD Raja Ampat	
11.00 – 13.00 (2 hr)	Pertemuan bersama DKP dan BLUD-UPTD Raja Ampat	<p>Tema: “Tata Kelola dan Pembiayaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi di Raja Ampat”</p> <p>Diskusi tentang tata kelola dan pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi di Raja Ampat.</p> <p>Narasumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D KP → kebijakan daerah dan integrasi konservasi laut. - BLUD-UPTD Kawasan Konservasi Raja Ampat → mekanisme dana retribusi wisata & pembiayaan operasional. <p>Tempat: Ruang Rapat, Kantor BLUD-UPTD Pengelolaan KKP Raja Ampat</p>
14.00 – 14.45 (45 m)	Perjalanan dari Waisai ke Saporken	
14.45 – 16.45 (2 hr)	Dialog Komunitas: Asosiasi Homestay & Pelaku Usaha Lokal (Saporken)	<p>Agenda: Diskusi dengan pelaku usaha lokal dan Asosiasi Homestay Adat mengenai pariwisata berbasis komunitas dan pengelolaan dana konservasi dari kontribusi wisatawan.</p> <p>Catatan Kontekstual: Homestay komunitas adat mencakup hampir 70% akomodasi wisata di Raja Ampat, seluruhnya dikelola oleh pemuda adat dan berperan penting dalam ekonomi lokal serta konservasi.</p> <p>Tempat: Homestay Mama Rengge</p>
14 November 2025 (Piaynemo-Raja Ampat, Sorong)		
11.00 – 12.30 (1 hr 30 m)	Observasi Kars Piaynemo & diskusi singkat: “Ekowisata dan Pembiayaan Konservasi”	<p>Agenda: Observasi karst Raja Ampat dan aktivitas pengumpulan kopra masyarakat</p> <p>Catatan: Jalur ±1.200 anak tangga (20 menit naik/turun), aman & telah direnovasi</p>
16.00 – 18.30 (2 hr 30 m)	Pelayaran Waisai - Sorong	Menggunakan kapal cepat

B. JALANNYA KUNJUNGAN

1. Kunjungan ke OECM Malaumkarta, Sorong, Papua Barat Daya

Delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI berkunjung ke Kampung Malaumkarta, wilayah adat Suku Moi yang dikenal dengan sistem konservasi tradisional Egek Laut. Sistem ini merupakan larangan adat sementara terhadap pengambilan hasil laut dan hutan untuk memberikan waktu pemulihan ekosistem, sekaligus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.



Foto bersama Delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dengan Masyarakat Kampung Malaumkarta.

Dok: BKSAP

Dalam dialog bersama masyarakat adat, terungkap berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan akses pendidikan, infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan, kebutuhan dukungan pemerintah pusat dan daerah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas generasi muda. Masyarakat juga memaparkan peta ruang hidup Malaumkarta Raya yang mencakup wilayah laut dan darat sebagai dasar pengelolaan sumber daya berbasis adat. Deklarasi bersama telah dilakukan dengan melibatkan unsur TNI, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, yang mencakup lima kampung di wilayah tersebut

Dalam sesi ini, masyarakat menyampaikan kebutuhan dukungan terkait perhutanan sosial dan hak kelola hutan adat tanpa izin tambahan. Praktik egek atau sasi atau larangan adat diterapkan selama satu tahun, dengan hasil panen dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan pembangunan fasilitas sosial, termasuk pembangunan gereja yang memerlukan dukungan lintas pihak. Masyarakat menegaskan pentingnya kesepakatan bersama

sebelum pengajuan pencabutan izin usaha tertentu, dengan merujuk pada pengalaman kasus kelapa sawit di wilayah lain.

2. Kunjungan ke KOBUMI

Dalam rangkaian kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI di Kota Sorong, delegasi melakukan peninjauan langsung terhadap praktik ekonomi biru berbasis komunitas yang dijalankan oleh PT KOBUMI (Koperasi Berkeadilan untuk Masyarakat Indonesia). KOBUMI merupakan perusahaan sosial-ekologis yang didirikan pada tahun 2022 dan dimiliki bersama oleh sejumlah koperasi masyarakat adat dan lokal di Indonesia Timur, dengan dukungan Yayasan EcoNusa.



Delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI meninjau PT KOBUMI yang menjalankan praktik ekonomi biru berbasis komunitas . Dok: BKSAP

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa KOBUMI berperan sebagai penghubung hasil bumi dan hasil laut masyarakat Papua, khususnya komoditas udang dan produk perikanan, ke pasar nasional dan internasional melalui skema perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Model bisnis KOBUMI menempatkan masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat utama, di mana keuntungan usaha tidak hanya dinikmati oleh entitas bisnis, tetapi juga dikembalikan untuk pengembangan komunitas dan upaya konservasi lingkungan.

Delegasi Panja mencatat bahwa praktik KOBUMI memperlihatkan potensi besar pengembangan rantai nilai perikanan berbasis komunitas, sekaligus menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan nasional terkait

ekonomi berkeadilan, pemberdayaan masyarakat adat, dan perdagangan berkelanjutan.

3. Pertemuan dengan BLUD-UPTD Raja Ampat

Pertemuan dengan BLUD-UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, di Raja Ampat berfokus pada pembahasan inovasi pengelolaan kawasan konservasi laut dalam kerangka ekonomi biru, khususnya keterkaitan antara pelestarian lingkungan, dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta keterlibatan masyarakat lokal. Disampaikan bahwa kawasan konservasi perairan Raja Ampat mencakup wilayah seluas sekitar 1,6 juta hektare, dengan kebutuhan biaya operasional yang besar untuk perlindungan, pemantauan, dan pengawasan. Diskusi menyoroti pentingnya sistem pembayaran, tata kelola pariwisata, dan perlindungan ekosistem laut sebagai satu kesatuan kebijakan.



Anggota Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI Robert J. Kardinal bertukar cenderamata dengan perwakilan BLUD-UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat. **Dok: BKSAP**

Pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat telah mendorong munculnya inovasi ekonomi jasa lingkungan dan pariwisata berbasis konservasi. Kawasan ini tercatat menciptakan sedikitnya tujuh jenis lapangan kerja utama yang terkait langsung dengan pengelolaan kawasan dan aktivitas wisata. Pemerintah daerah dan masyarakat menekankan visi pembangunan yang inklusif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai bisnis pariwisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Dalam aspek pembiayaan dan pengelolaan wisata, Raja Ampat menerapkan sistem pembayaran untuk penggunaan fasilitas dan akses kawasan tertentu. BLUD-UPTD memaparkan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagai solusi untuk meningkatkan fleksibilitas pendanaan, mengurangi ketergantungan pada APBD/APBN, serta membuka peluang kerja sama dengan mitra non-pemerintah dan donor. Sistem Jasa Layanan Kawasan Konservasi (JALASASI) menjadi instrumen utama dalam pembiayaan konservasi, dengan tarif layanan yang dibedakan bagi wisatawan domestik dan internasional.



Suasana diskusi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dengan BLUD-UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat. **Dok: BKSAP**

Delegasi Panja mencatat bahwa pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat telah menciptakan sedikitnya tujuh jenis lapangan kerja utama yang terkait langsung dengan aktivitas konservasi dan pariwisata bahari. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, antara lain tekanan kunjungan wisata terhadap terumbu karang, keterbatasan sarana prasarana seperti mooring buoy, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola.

Dampak aktivitas wisatawan, seperti snorkeling, berpotensi merusak terumbu karang jika tidak dikelola dengan pembatasan yang jelas. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pengembangan kampung pesisir pada tahun 2025, mencakup penyediaan dermaga, *cold storage*, air bersih, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Nelayan (SPBN) sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat di tengah pembatasan aktivitas demi konservasi.

Dari sisi kebijakan, disampaikan bahwa dukungan pendanaan internasional mengalami perubahan sejak 2014 seiring kebijakan pemerintah yang membatasi bantuan luar negeri, sehingga diperlukan penguatan sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan. Beberapa perusahaan yang sebelumnya beroperasi di kawasan pulau telah ditutup, dengan satu perusahaan milik negara yang masih beroperasi. Tantangan utama ke depan adalah pengelolaan jumlah pengunjung, pelestarian lingkungan, serta keterbatasan pendapatan tahunan yang dinilai belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan pengelolaan kawasan secara optimal.

4. Asosiasi Homestay Raja Ampat, Warimpurem

Diskusi dengan Asosiasi Homestay Raja Ampat menyoroti peran penting pariwisata berbasis masyarakat dalam mendukung ekonomi lokal sekaligus konservasi lingkungan. Homestay di Raja Ampat dikelola oleh masyarakat adat melalui asosiasi yang bersifat nirlaba dan didukung oleh PT Bahari Perjampat Sejahtera (PERJAMPAT) sebagai entitas pengelola sistem. Tercatat PERJAMPAT memiliki laman sendiri, yaitu www.stayrajaampat.com untuk mengelola pemesanan homestay.



Pertemuan delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dengan Asosiasi Homestay Raja Ampat dan Yayasan EcoNusa. Dok: BKSAP

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor ini, dengan sekitar 70% dari total homestay sempat berhenti beroperasi. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui kerja sama dengan Yayasan EcoNusa sejak 2019, termasuk pendanaan langsung dan pendampingan. Sejak 2021, sekitar 30 homestay berhasil dipulihkan dan kembali menerima tamu. Saat

ini tercatat 146 homestay aktif dengan sistem pemesanan daring yang dikelola secara mandiri oleh asosiasi, dengan jumlah kunjungan pada tahun 2024 mencapai sekitar 6.000 pemesanan melalui platform asosiasi.

Diskusi juga menyoroti tantangan utama sektor homestay, antara lain keterbatasan aksesibilitas, pemerataan tamu, serta ancaman lingkungan seperti kerusakan laut dan hutan. Untuk menjaga keadilan ekonomi, asosiasi menerapkan pembatasan kepemilikan maksimal sepuluh homestay per orang. Sistem pembayaran dilakukan secara terpusat melalui PERJAMPAT dan disalurkan dua kali dalam sebulan guna mengantisipasi risiko pembatalan dan keluhan tamu.

Selain pariwisata, muncul inisiatif ekonomi lokal pasca COVID-19 melalui gerakan akar rumput, terutama kelompok perempuan yang mengembangkan kegiatan pertanian dan menyuplai hasilnya ke homestay dan resort. Ke depan, asosiasi menargetkan perluasan anggota, peningkatan pelatihan layanan, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan agar ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang.



Foto bersama delegasi Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI dengan Asosiasi Homestay Raja Ampat dan Yayasan EcoNusa. **Dok: BKSAP**

C. PARTISIPASI DELEGASI BKSAP DPR RI

Di Malaumkarta, Anggota BKSAP DPR RI Robert Joppy Kardinal menyampaikan bahwa praktik konservasi adat di Malaumkarta memberikan banyak pembelajaran penting bagi kebijakan nasional. Menurutnya, aturan-aturan adat seperti Egek Laut tidak hanya relevan untuk pelestarian

lingkungan, tetapi juga dapat menjadi dasar rujukan dalam perumusan kebijakan konservasi yang lebih inklusif dan kontekstual di tingkat pusat.

Menyambut pernyataan tersebut, Anggota BKSAP DPR RI, Faujia Helga Br. Tampubolon juga menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat setempat bersama-sama dengan Anggota DPR RI lainnya, baik dari BKSAP maupun melalui Komisi terkait.

Dalam kunjungan ke KOBUMI, Anggota Panja Ekonomi Biru DPR RI, Faujia Helga Br. Tampubolon, mengapresiasi praktik KOBUMI yang mampu menyerap hasil tangkapan masyarakat dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Menurutnya, kehadiran KOBUMI menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki kapasitas untuk membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan profesional. Model ini dinilai sebagai contoh konkret penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam pertemuan dengan BLUD/UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi praktik tata kelola homestay yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pemerataan rezeki. Asosiasi menerapkan pembatasan kepemilikan homestay serta sistem alih pesanan untuk memastikan pendapatan terdistribusi secara merata. Praktik ini dinilai sebagai bentuk kearifan lokal modern yang memperkuat harmoni sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sebagai penutup, Mardani mencatat bahwa Seluruh rangkaian kunjungan kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat menunjukkan bahwa penerapan ekonomi biru yang efektif memerlukan integrasi antara kebijakan, tata kelola pembiayaan, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Temuan lapangan ini menjadi landasan penting bagi penyusunan rekomendasi Panja Ekonomi Biru dalam mendukung kebijakan nasional dan diplomasi parlemen Indonesia di bidang kelautan dan pembangunan berkelanjutan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025, memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Penerapan ekonomi biru di Papua Barat Daya menunjukkan praktik nyata yang mengintegrasikan konservasi dan kesejahteraan masyarakat.**

Pengelolaan kawasan konservasi laut di Raja Ampat, sistem konservasi adat Egek Laut di Malaumkarta, serta model ekonomi berbasis komunitas seperti KOBUMI dan asosiasi homestay, memperlihatkan bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan penciptaan nilai ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

- 2. Kearifan lokal dan partisipasi masyarakat adat menjadi fondasi utama keberlanjutan kebijakan ekonomi biru.**

Praktik adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, pembagian manfaat ekonomi, serta mekanisme sosial pengawasan terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan konservasi di tingkat lokal.

- 3. Inovasi tata kelola dan pembiayaan kawasan konservasi merupakan faktor kunci keberhasilan.**

Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD-UPTD dan sistem Jasa Layanan Kawasan Konservasi (JALASASI) di Raja Ampat memberikan fleksibilitas pendanaan, mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, serta membuka ruang kemitraan dengan berbagai pihak. Namun demikian, keterbatasan pendapatan tahunan dan tekanan jumlah kunjungan wisata masih menjadi tantangan utama.

- 4. Ekonomi biru berbasis komunitas terbukti mendorong kemandirian dan keadilan ekonomi.**

Model usaha sosial-ekologis KOBUMI serta tata kelola *homestay* berbasis asosiasi menunjukkan bahwa masyarakat pesisir mampu mengelola rantai nilai secara profesional, adil, dan berkelanjutan, dengan mekanisme distribusi manfaat yang menghindari konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak.

- 5. Sinergi pusat-daerah dan lintas pemangku kepentingan menjadi prasyarat keberlanjutan.**

Keberhasilan Raja Ampat ditopang oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pengelola kawasan, dan organisasi non-

pemerintah. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi biru memerlukan pendekatan kolaboratif, bukan sektoral.

B. Adapun sejumlah saran yang dapat disampaikan Delegasi BKSAP DPR RI berdasarkan hasil dialog dalam kunjungan kerja ini antara lain adalah:

1. Penguatan pengakuan dan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan nasional.

Pemerintah pusat perlu memperkuat kerangka regulasi yang mengakui dan melindungi sistem konservasi adat, seperti Egek Laut, sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan ekonomi biru nasional.

2. Pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi.

Diperlukan dukungan kebijakan untuk memperluas dan memperkuat instrumen pembiayaan inovatif, termasuk optimalisasi BLUD-UPTD, sistem jasa lingkungan, serta potensi pembiayaan berbasis hasil dan kemitraan multipihak, guna menjamin keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut.

3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan dukungan terhadap penguatan kapasitas pengelola kawasan, masyarakat adat, dan pelaku usaha lokal, khususnya dalam aspek tata kelola, pengawasan, pelayanan wisata berkelanjutan, dan manajemen keuangan.

4. Pengelolaan pariwisata berbasis daya dukung dan keadilan sosial.

Diperlukan pengaturan yang lebih tegas terkait pembatasan jumlah kunjungan wisata, pengendalian aktivitas berisiko terhadap ekosistem laut, serta penguatan mekanisme distribusi manfaat ekonomi agar pariwisata tidak merusak lingkungan dan tetap berpihak pada masyarakat lokal.

5. Replikasi praktik baik sebagai model nasional ekonomi biru.

Praktik-praktik baik yang ditemukan di Sorong dan Raja Ampat, termasuk model usaha berbasis komunitas, tata kelola homestay, dan pengelolaan kawasan konservasi, perlu didokumentasikan dan dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program ekonomi biru di daerah lain.

6. Pemanfaatan hasil kunjungan untuk diplomasi parlemen.

Temuan dan pembelajaran dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh BKSAP DPR RI sebagai bahan diplomasi parlemen Indonesia dalam forum bilateral dan multilateral, khususnya terkait isu kelautan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Penyelenggaraan dan partisipasi Delegasi DPR RI pada Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 Nomor MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC001.051.D.524111 berjumlah Rp253.828.200 (Dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

B. DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

1. Dokumentasi foto

Dokumentasi foto kegiatan Panja Ekonomi Biru ke Raja Ampat ([link](#))

2. Publikasi berita

1. [Panja Blue Economy BKSAP Dorong Raja Ampat Jadi Contoh Wisata Ramah Konservasi](#)
2. [Mardani Ali Sera Apresiasi Local Wisdom Homestay Warimpurem: “Hidup Tentang Harmoni dan Saling Menjaga](#)
3. [Faujia Helga Apresiasi Inovasi Perusahaan Sosial-Ekologis di Papua Barat Daya](#)
4. [Panja Blue Economy BKSAP DPR Kunjungi Sorong, Dorong Diplomasi Parlemen di Bidang Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan](#)
5. [Panja Ekonomi Biru: Local wisdom wujudkan pengelolaan homestay yang berkeadilan](#)
6. [Panja Ekonomi Biru: ‘Egek Laut’ cermin ekonomi biru berbasis adat dan budaya](#)
7. [Panja Ekonomi Biru: Perkuat sinergi pengembangan ekonomi biru dan lingkungan](#)
8. [Panja Ekonomi Biru: Tinjau Praktik ekonomi dan konservasi laut di Sorong](#)

C. KATA PENUTUP

Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, The ICCF Group, Yayasan EcoNusa, dan berbagai

pihak lain yang telah menerima dan memfasilitasi dialog dalam rangka Kunjungan Kerja Panja Ekonomi Biru BKSAP DPR RI ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya pada tanggal 11-15 November 2025.

Dukungan, sambutan hangat, serta pertukaran pengetahuan yang konstruktif telah memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sukses, lancar, dan penuh manfaat bagi penguatan diplomasi parlemen Indonesia dalam isu ekonomi biru. Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi DPR RI dalam memperkuat peran parlemen Indonesia sebagai aktor strategis dalam agenda ekonomi biru dan konservasi laut di tingkat regional dan global.

Jakarta, November 2025

Ketua Delegasi,

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.

A-447

LAMPIRAN



Concept Note

Misi Lapangan untuk Pembiayaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi dan Tata Kelola Konservasi Laut

Sorong & Raja Ampat (Papua Barat Daya) | 9-13 November 2025

Gambaran Umum

Indonesia tengah memperkuat pendekatan konservasi laut dengan menghubungkan perlindungan ekologi dengan pembiayaan berkelanjutan dan tata kelola lokal. Perluasan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan *Other Effective area-based Conservation Measures* (OECM) dalam kerangka target nasional seperti *MPA Vision 2030* membutuhkan model praktis untuk pendanaan jangka panjang, koordinasi kelembagaan, dan integrasi penghidupan masyarakat. Pertanyaannya kini bukan hanya seberapa luas area yang dilindungi, tetapi bagaimana area tersebut dikelola, dibiayai, dan dipertahankan melalui partisipasi masyarakat.

Misi lapangan ini berfokus pada Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai salah satu contoh penerapan pembiayaan berkelanjutan dalam tata kelola kawasan konservasi laut. Di wilayah ini, tata kelola masyarakat adat dan komunitas pesisir dikembangkan untuk menyelaraskan pengelolaan laut berbasis kearifan lokal dengan tujuan konservasi.

Raja Ampat menunjukkan bagaimana kegiatan ekonomi berbasis masyarakat dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Melalui pariwisata berbasis masyarakat, asosiasi homestay, serta usaha pesisir skala kecil, seperti pengeringan kelapa, pengolahan hasil mangrove, dan pemanfaatan udang, komunitas setempat berkontribusi terhadap biaya operasional konservasi sekaligus mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Misi lapangan ini akan melihat bagaimana mekanisme tata kelola dan pembiayaan di Raja Ampat diimplementasikan: bagaimana pendanaan dikelola, peran antar-lembaga diatur, dan manfaat ekonomi dibagikan secara adil. Dari *field mission* ini diharapkan memberikan gambaran konkret bagi penyusunan strategi nasional pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi laut, sehingga upaya perlindungan lingkungan dapat didukung oleh sistem ekonomi lokal yang stabil, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Misi Lapangan

Kunjungan lapangan ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman praktis tentang bagaimana mekanisme pembiayaan berkelanjutan beroperasi dalam konteks konservasi laut. Kegiatan ini akan memberikan paparan langsung terhadap institusi lokal, aliran pembiayaan, dan praktik manajemen yang menghubungkan perlindungan ekologi dengan

kesejahteraan masyarakat. Empat tujuan utama misi ini adalah:

1. Mengamati implementasi lapangan dari sistem pembiayaan dan tata kelola dalam KKP dan OECM, termasuk bagaimana biaya operasional, penegakan hukum, dan kegiatan penghidupan didukung.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan sumber pembiayaan berbasis masyarakat, publik, atau gabungan (*blended finance*) untuk manajemen konservasi.
3. Mendokumentasikan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan mitra dalam penerapan mekanisme pembiayaan yang selaras dengan kebijakan laut nasional seperti *Blue Economy Roadmap* dan *MPA Vision 2030*.
4. Mengumpulkan pelajaran dan masukan praktis untuk perancangan kerangka kerja nasional pembiayaan berkelanjutan kawasan konservasi, dengan perhatian khusus pada akuntabilitas, inklusi sosial, dan kelayakan fiskal.

Melalui tujuan-tujuan tersebut, misi ini bertujuan memberikan perspektif berbasis lapangan mengenai pengaturan kelembagaan dan finansial yang dapat mendukung perlindungan laut jangka panjang di Indonesia.

Poin Diskusi Utama

Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi di Raja Ampat

Raja Ampat mewakili model konservasi yang terus berkembang, di mana tata kelola laut adat dan kegiatan ekonomi lokal berjalan dalam kerangka kawasan lindung yang lebih luas. Diskusi ini akan menyoroti:

- Proses pembentukan dan pengelolaan OECM , termasuk pengakuan hukum, peran kelembagaan, dan koordinasi dengan otoritas kelautan provinsi.
- Mekanisme bagaimana pariwisata berbasis komunitas, homestay, dan usaha kecil (seperti pengolahan kelapa dan udang) berkontribusi pada biaya konservasi dan pendapatan lokal.
- Pertemuan masyarakat dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan ekonomi pesisir serta kawasan konservasi untuk memahami langsung sistem tata kelola dan sumber pembiayaan di tingkat komunitas.
- Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata, batas ekologis, dan distribusi manfaat lokal.
- Peluang untuk memperluas pendekatan pembiayaan OECM dan mengintegrasikannya ke dalam instrumen kebijakan nasional, terutama melalui penguatan kapasitas lokal dan dukungan kelembagaan pemerintah daerah.
- Peluang untuk memperluas pendekatan pembiayaan OECM dan mengintegrasikannya ke dalam instrumen kebijakan nasional, termasuk inisiatif Coral Bond dan skema pendanaan lingkungan BPDLH.



Hasil yang Diharapkan

Misi lapangan ini diharapkan menghasilkan pemahaman praktis tentang bagaimana pembiayaan berkelanjutan mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan sumber daya laut. Hasilnya akan mencakup:

1. **Dokumentasi berbasis lapangan** tentang mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam KKP dan OECM, termasuk struktur tata kelola, sumber dana, dan sistem akuntabilitasnya.
2. **Ringkasan pelajaran (*lessons learned*)** dari inisiatif lokal mengenai integrasi konservasi dengan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.
3. **Rekomendasi untuk penyelarasan kebijakan dan program**, dengan fokus pada bagaimana kerangka nasional seperti *Blue Economy Roadmap* dan *MPA Vision 2030* dapat lebih mengakomodasi model pembiayaan yang telah diuji di lapangan.
4. **Identifikasi lokasi percontohan atau model kemitraan potensial** untuk replikasi atau tinjauan legislatif di masa depan.



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION



MENYELAMI KEARIFAN ADAT DI HUTAN DAN LAUT PAPUA

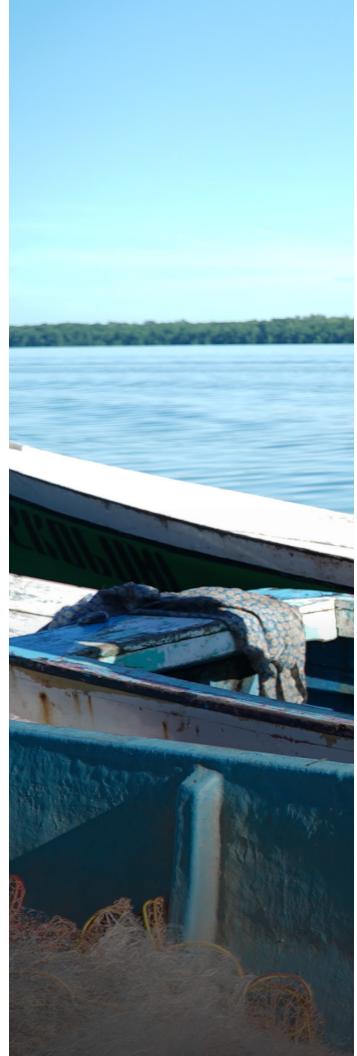
Perjalanan ke jantung hutan dan laut Papua. tempat alam dan budaya berpadu harmonis. Temukan bagaimana masyarakat adat melestarikan ekosistem penting ini melalui pengetahuan leluhur, tradisi berkelanjutan, dan inisiatif berbasis komunitas, demi memastikan hutan tetap hidup dan lestari bagi generasi mendatang.

**Profil EcoNusa dan Panduan Kunjungan Anggota
DPR-RI ke Provinsi Papua Barat Daya**



Daftar Isi

Pendahuluan	3
Tentang EcoNusa	5
Nilai-nilai Organisasi	7
Wilayah Kerja EcoNusa	8
Tentang KOBUMI	9
Itinerary Overview	17
Site Profiles	21
Papua: Dari Alam untuk Masa Depan	34





Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

02



Pendahuluan:



Hutan Papua merupakan salah satu benteng terakhir hutan tropis besar di dunia. Ekosistem yang kaya dan beragam ini menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik dan memiliki keterikatan yang mendalam dengan kehidupan serta budaya masyarakat adat. Lebih dari sekadar sistem ekologis, hutan-hutan ini adalah ruang hidup, penopang budaya, sekaligus sumber penting bagi pangan, obat-obatan, dan keamanan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, warisan alam yang tak ternilai ini kini menghadapi ancaman serius dari deforestasi berskala besar, pertambangan, dan ekspansi infrastruktur. Masyarakat adat yang telah hidup berdampingan secara harmonis dengan alam selama ribuan tahun menjadi garda terdepan dalam upaya melindungi dan mengelola hutan melalui pengetahuan tradisional dan konservasi berbasis komunitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif telah difokuskan pada pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat, pengembangan ekonomi restoratif yang berkelanjutan berbasis hutan, serta integrasi konservasi darat dan laut.

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Beragam hasil hutan seperti pala, cengkeh, kakao, dan madu kini dikembangkan melalui rantai nilai yang inklusif dan dijalankan langsung oleh komunitas, memperkuat peran koperasi adat serta perempuan pengusaha di tingkat lokal.

Pendekatan terpadu ini sejalan dengan visi **Provinsi Pembangunan Berkelanjutan Papua Barat Daya**, yang berkomitmen untuk mempertahankan setidaknya 70% tutupan hutannya dan mengelola secara efektif 50% wilayah lautnya. Upaya pelestarian hutan di Papua bukan sekedar tentang menjaga ekologi tetapi juga menjadi fondasi bagi ketahanan budaya, keadilan sosial, dan kemandirian masyarakat adat.

Buku program ini mengajak pembaca untuk menjelajahi dan memahami pentingnya melindungi hutan Papua melalui perspektif kepemimpinan adat, keberlanjutan, dan martabat manusia.



Tentang EcoNusa

Yayasan EcoNusa (Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan) didirikan sebagai organisasi nirlaba pada 21 Juli 2017. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah timur Indonesia. Melalui strategi inovatif, EcoNusa terus memperkuat inisiatif lokal dan internasional meskipun menghadapi berbagai tantangan di kawasan tersebut. Menjelang tahun 2025, EcoNusa memfokuskan pada empat strategi utama:

Mengembangkan Model Inovatif untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam:

EcoNusa memprioritaskan pengembangan model inovatif dalam pengelolaan sumber daya alam bersama dengan masyarakat adat. Yayasan EcoNusa percaya bahwa pengelolaan ekonomi berbasis komoditas yang berkelanjutan dapat memperkuat prinsip keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya.

Meningkatkan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Jaringan Lokal

Dengan memperkuat kapasitas OMS lokal, EcoNusa bertujuan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pelatihan, pendampingan, serta pembangunan jejaring kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dan regional.



Menciptakan Harmoni antara Kebijakan dan Agenda Pembangunan

EcoNusa berkomitmen untuk mendorong sinergi antar kebijakan yang ada guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. Upaya ini melibatkan advokasi kebijakan, dialog dengan para pembuat kebijakan, serta keterlibatan aktif dengan masyarakat adat dan pemangku kepentingan lainnya.

Menjunjung Tinggi Nilai Kedaulatan dan Keberlanjutan

EcoNusa tetap teguh dalam menjunjung nilai kedaulatan dan keberlanjutan di setiap inisiatifnya. Dengan mempromosikan praktik terbaik dalam perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, yayasan bekerja bersama masyarakat lokal untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat dan penghidupannya.

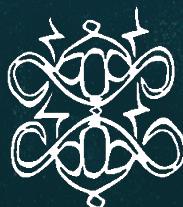
Melalui strategi-strategi tersebut, EcoNusa berkomitmen untuk memajukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.



Nilai-nilai Organisasi



Keadilan Sosial
dan Lingkungan



Kesetaraan



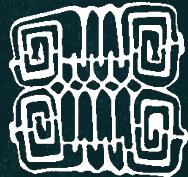
Transformasi



Akuntabilitas



Integritas



Keunggulan



Inklusivitas

Wilayah Kerja EcoNusa



PROVINSI MALUKU UTARA

- Halmahera

PROVINSI MALUKU

- Kota Ambon
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Dobo

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- Kota Sorong
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Raja Ampat
- Kab. Tambrauw

PROVINSI PAPUA BARAT

- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Pegunungan Arfak
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Fakfak

PROVINSI PAPUA

- Jayapura
- Kab. Jayapura
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Biak
- Kab. Waropen
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Memberamo Raya

PROVINSI PAPUA SELATAN

- Kab. Merauke
- Kab. Boven Digoel

PROVINSI PAPUA TENGAH

- Kab. Nabire
- Kab. Dogiyai

KANTOR ECONUSA:

- Sorong
- Sorong Selatan
- Manokwari
- Kaimana
- Jayapura
- Merauke
- Halmahera
- Ambon
- Kepulauan Banda

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

08

KOBUMI

Finest Goods of The Eastern Paradise

Tentang KOBUMI

KOBUMI adalah sebuah perusahaan sosial-ekologis milik komunitas yang didirikan pada tahun 2022. KOBUMI dimiliki bersama oleh sejumlah koperasi yang mewakili masyarakat adat dan lokal di Indonesia Timur, bekerja sama dengan Yayasan EcoNusa. KOBUMI menghubungkan produk-produk lokal ke pasar secara adil dan transparan sekaligus memperkuat ekonomi komunitas dan melindungi lingkungan.

Keuntungan yang dihasilkan KOBUMI diinvestasikan kembali ke dalam program pengembangan masyarakat dan konservasi, memastikan bahwa masyarakat adat dan lokal tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memimpin dan memperoleh manfaat dari perubahan. Untuk mengelola operasi dan memaksimalkan dampak sosial serta lingkungan, KOBUMI telah membangun jaringan di berbagai wilayah Indonesia Timur.

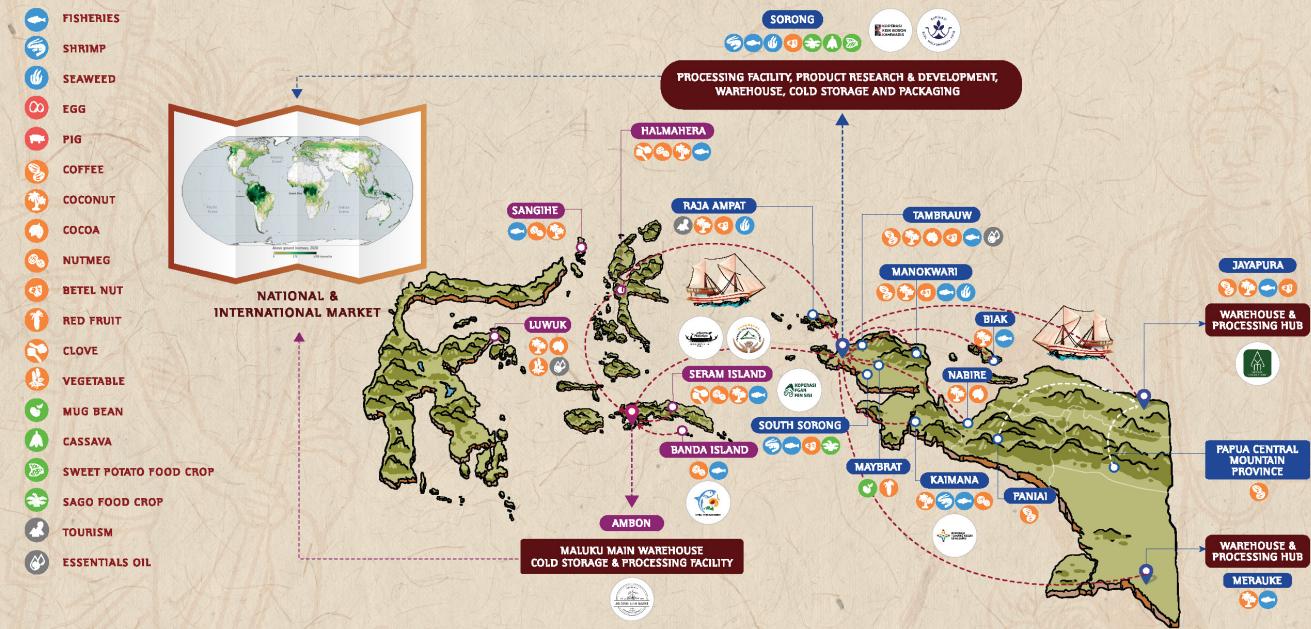


Peta berikut menggambarkan sebaran wilayah operasional dan pusat produksi KOBUMI di wilayah Timur Indonesia.





INDIGENOUS PRODUCT SUPPLY CHAIN



KOBUMI VALUE CHAIN



Komoditas Unggulan KOBUMI



Pala dan Bunga Pala



Cengkih



Vanili



Kopra



Kakao



Minyak Nilam



Udang



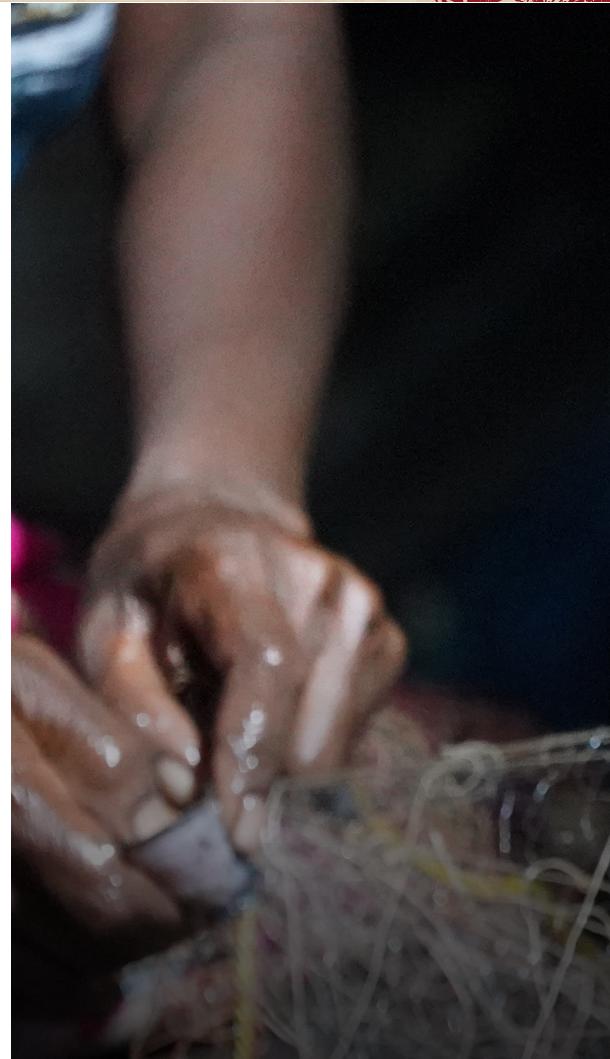
Rumput Laut



Kopi



Ikan





Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

14



15

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua





Gudang dan Operasional KOBUMI

Gudang KOBUMI berfungsi sebagai pusat operasional dari inisiatif sosial-ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan petani dan pengembangan komoditas lokal berkelanjutan. Berdiri pada tahun 2022 melalui kemitraan antara Yayasan EcoNusa, masyarakat adat, serta koperasi lokal di Papua dan Maluku, saat ini KOBUMI mengoperasikan dua gudang utama: satu di Sorong untuk produk kelautan, dan satu lagi di Ambon untuk produk hasil hutan bukan kayu, termasuk rempah-rempah.

Seluruh komoditas yang dikelola di gudang KOBUMI berasal langsung dari petani dan komunitas lokal. Produk-produk tersebut kemudian diproses sesuai standar mutu untuk memastikan nilai tambah sebelum dipasarkan ke pembeli domestik maupun internasional.

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua 16



Itinerary Overview

Day 1 - Sorong		November 11, 2025
00:10 - 6:15	Penerbangan Jakarta-Sorong	Garuda Indonesia (GA-682)
06:35 - 08:00	Tiba di Bandara Domine Eduard Osok & penjemputan	Oleh panitia
08.00 - 08.30	Transfer ke hotel	Aston Hotel Sorong
09.30	Check-in hotel	
10.00	Istirahat	
18.30	Makan malam	Aston Hotel Sorong

Day 2 - Malaumkarta		November 12, 2025
06.30 - 08.30	Sarapan di hotel	
08.30 – 10.00	Perjalanan menuju Malaumkarta	±45–60 menit ke Distrik Makbon
10.00 – 12.00	Kunjungan Lapangan: OECM Malaumkarta	Penyambutan adat & diskusi 'Egek Laut' (konservasi adat Moi)
12.00 – 13.00	Makan siang bersama masyarakat	Menu lokal; tanpa nasi kotak



Day 2 - Malaumkarta

November 12, 2025

13.00 - 14.30	Perjalanan ke fasilitas KOBUMI	
14.30 - 15.30	Kunjungan: Fasilitas Pengumpulan Udang KOBUMI	Diskusi ekonomi biru & rantai nilai udang rakyat
15.30 - 17.00	Perjalanan ke tempat makan malam	
17.00 - 20.00	Makan Malam Bersama Perwakilan Pemerintah Papua Barat Daya	Marina Star Restaurant
20.00	Kembali ke hotel & istirahat	

Day 3 - Raja Ampat

November 13, 2025

06.30 – 09.00	Sarapan & check-out	Aston Hotel Sorong
09.15 – 10.00	Pelayaran dari Marina - Waisai	Kapal cepat (charter)
10.00 – 10.30	Check-in resort	Koprak
10.30 – 11.00	Perjalanan ke Kantor BLUD-UPTD	Koprak
11.00 – 13.00	Pertemuan bersama DKP & BLUD-UPTD Raja Ampat	Tema: 'Tata Kelola & Pembiayaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi'
13.00 – 14.30	Makan siang	Koprak

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

18

**Day 3 - Raja Ampat**

November 13, 2025

14.30 – 15.15	Perjalanan ke Saporkren	
15.15 – 17.15	Dialog Komunitas: Asosiasi Homestay & Pelaku Usaha Lokal	Diskusi pariwisata berbasis komunitas & dana konservasi
17.15 – 18.15	Kembali ke resort	
18.30	Makan malam & istirahat	Resort

Day 4 - Piyanemo, Sorong

November 14, 2025

06.30 – 10.00	Sarapan & persiapan aktivitas laut	Resort
09.00 – 11.00	Pelayaran ke Piaynemo / Pulau Fam	±2 jam
11.00 – 12.30	Observasi Kars Piaynemo & Diskusi	'Ekowisata dan Pembiayaan Konservasi'
12.30 – 15.30	Kegiatan opsional (diving/snorkeling)	Lokasi : Piaynemo
16.00 – 18.30	Pelayaran Piaynemo - Sorong	Speedboat
18.30	Check-in hotel & makan malam	Aston Hotel Sorong



06.00	Transfer ke Bandara Domine Eduard Osok	Mengunjungi Doberai Lounge and Gallery
06.00 - 08.00	Check-in & persiapan boarding	
08.15 – 10.10	Penerbangan Sorong–Jakarta	Garuda Indonesia (GA-683)
10.10	Tiba di Bandara Soekarno-Hatta	Akhir kegiatan



Site Profiles



Malaumkarta

Memetakan Tanah Adat, Melindungi Laut, dan Panen Energi dari Hutan

Malaumkarta, sebuah kampung pesisir di Kabupaten Sorong, Papua Barat, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat menegaskan kedaulatan atas wilayah leluhur mereka melalui pemetaan tanah adat. Dengan batas-batas yang jelas dan aturan yang disepakati bersama, masyarakat mengambil langkah nyata untuk mengelola darat dan laut mereka secara berkelanjutan.

Salah satu pilar utama upaya konservasi di Malaumkarta adalah “**egek laut**”, sebuah sistem pelindungan laut berbasis adat. Dalam sistem ini, wilayah tertentu di laut ditetapkan sebagai zona tertutup yang artinya tidak boleh digunakan untuk menangkap ikan atau mengambil sumber daya laut selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kampung. Metode penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom atau racun, sepenuhnya dilarang. Sistem ini memungkinkan populasi ikan pulih dan menjamin ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat.

Seiring dengan itu, pembangunan ekonomi juga tumbuh. Dengan memadukan nilai-nilai konservasi tradisional dan solusi modern, masyarakat Malaumkarta kini mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa menguras sumber daya alam mereka. Mereka menjual hasil lokal, membuka pengalaman wisata budaya, dan terus berinovasi dengan mempertahankan adat budaya dan kelestarian ekosistem.

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

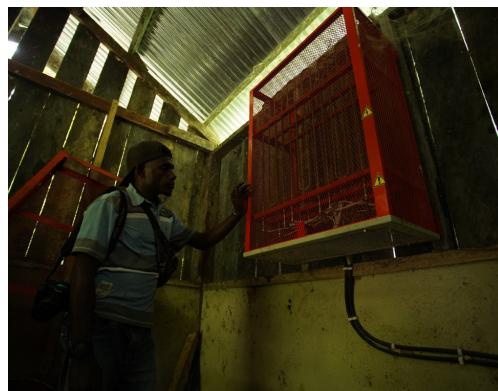
22



Mikrohidro: Hutan yang Mengaliri Energi Kehidupan

Malaumkarta juga menjadi contoh bagaimana masyarakat adat dapat memimpin pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pelestarian lingkungan dan penerapan teknologi tepat guna. Dikenal karena komitmennya terhadap konservasi laut melalui wilayah adat perairan, Malaumkarta kini juga menjaga hutan daratnya dengan visi yang sama. Hutan yang dulu hanya dipandang sebagai sumber kayu atau keanekaragaman hayati, kini memiliki peran baru: **mengalirkan energi bersih bagi kampung**.

Pusat transformasi ini adalah **pembangkit listrik mikrohidro** yang dibangun secara lokal. Dengan memanfaatkan aliran sungai yang melintasi hutan yang masih terjaga, masyarakat menciptakan pasokan listrik yang bersih, andal, dan sepenuhnya mandiri dari jaringan listrik nasional. Inisiatif ini membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari: rumah-rumah kini terang benderang, keluarga bisa memasak, belajar, dan bekerja setelah gelap. Sekolah-sekolah memiliki penerangan dan komputer, membuka akses pendidikan yang lebih baik. Posyandu dan fasilitas kesehatan kini dapat beroperasi siang dan malam dengan dukungan penerangan dan peralatan dasar yang berteknologi ramah lingkungan.





Yang terpenting, sistem ini memperkuat komitmen masyarakat untuk melindungi hutan. Mikrohidro sepenuhnya bergantung pada aliran air yang bersih dan stabil—yang hanya dapat terjaga jika ekosistem sekitarnya tetap sehat. Di Malaumkarta, pelestarian hutan bukan lagi sekadar kewajiban ekologis, tetapi telah menjadi **kunci ketahanan energi dan ketangguhan komunitas**.

Proyek mikrohidro ini dirancang dan dijalankan dengan keterlibatan aktif masyarakat. Warga berpartisipasi dalam perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan sistem. Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan konteks lokal, memastikan bahwa pengetahuan dan kapasitas pengelolaannya tetap berada di tangan masyarakat sendiri.

Kisah mikrohidro Malaumkarta bukan sekadar proyek energi—melainkan **model pembangunan terpadu yang dipimpin oleh komunitas lokal**. Ini membuktikan bahwa ketika masyarakat diberi kepercayaan dan alat untuk mengelola sumber dayanya sendiri, mereka mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan, memberdayakan, dan selaras dengan alam.

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua 24



Fasilitas KOBUMI

Udang Tangkapan Masyarakat Adat Dipasarkan ke Pasar Nasional

Di Kampung Konda, Kabupaten Sorong Selatan, udang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat. Hasil tangkapan mereka menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, dan mengakses layanan kesehatan. Namun, keberadaan para tengkulak kerap membuat mereka sulit lepas dari jerat utang.

EcoNusa mendorong masyarakat di kampung-kampung tersebut untuk membentuk koperasi yang bertugas membeli dan menyalurkan hasil produksi mereka. Salah satunya adalah **Koperasi Fgan Fen Sisi** di Konda. Udang hasil tangkapan masyarakat adat kemudian disalurkan melalui koperasi ini ke **PT KOBUMI**, yang juga mendapat dukungan dari EcoNusa.

PT KOBUMI mengelola **fasilitas penyimpanan udang di Sorong**, yang memastikan hasil tangkapan masyarakat adat dan lokal tetap segar sebelum dikirim ke pasar nasional. Fasilitas ini dilengkapi dengan ruang penyimpanan dingin berkapasitas **10 ton**, serta mesin berteknologi **air blast freezing** yang mampu membekukan hingga **1 ton udang per jam**. Teknologi ini memungkinkan pembekuan cepat dimana udang dapat membeku sempurna hanya dalam waktu satu jam.





Udang hasil tangkapan masyarakat adat Papua kini dipasarkan ke berbagai kota besar di Indonesia dengan harga yang kompetitif, termasuk Jakarta dan Ternate. Pada tahun 2023, PT KOBUMI berhasil mendistribusikan **1.644 kilogram udang**, dan pada **2024**, jumlahnya meningkat menjadi **3.338,14 kilogram**.

Kolaborasi antara KOBUMI, koperasi lokal, EcoNusa, dan masyarakat adat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan. Kini, masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Selain membeli udang dengan harga yang lebih menguntungkan, koperasi juga memberikan **pendidikan lingkungan** mengenai peran penting hutan mangrove sebagai **tempat berkembang biak udang**. Berkat pengetahuan ini, masyarakat menjaga agar hutan mangrove tetap tumbuh subur, memastikan keberlanjutan sumber daya udang di masa depan.

Masyarakat Konda kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak. Setiap kilogram udang yang mereka tangkap menjadi **langkah menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan**, simbol harapan baru bagi masyarakat adat Papua.



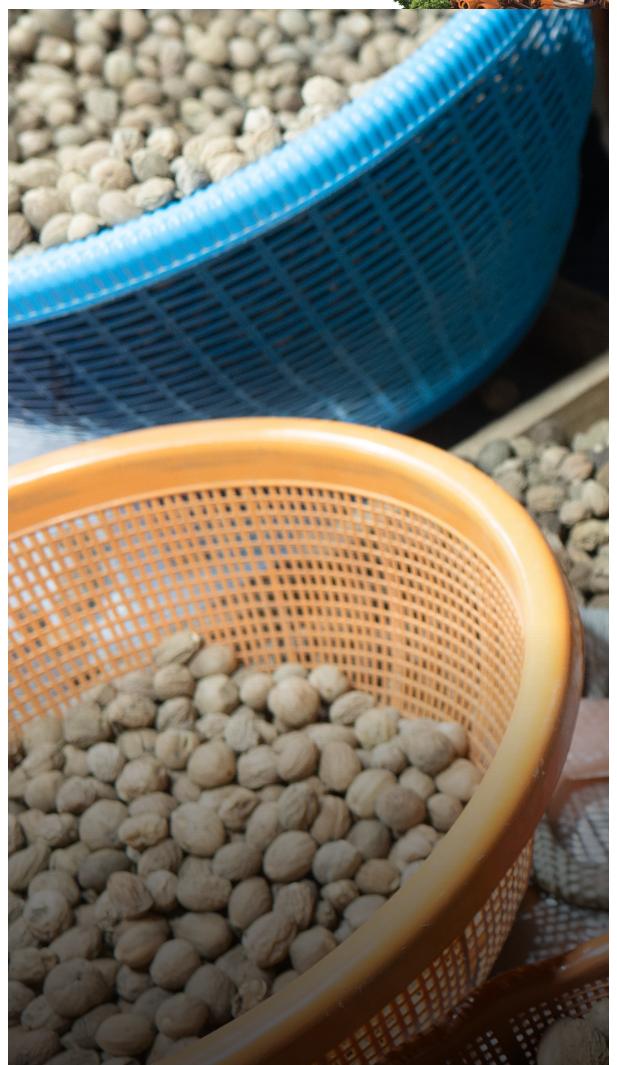
Gudang KOBUMI

Pusat Gerakan Ekonomi Sosial untuk Kemandirian Komoditas Lokal

Gudang KOBUMI menjadi pusat operasional dari sebuah inisiatif sosial ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan petani serta pengembangan komoditas lokal berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2022 melalui kemitraan antara Yayasan EcoNusa, masyarakat adat, dan koperasi lokal di wilayah Papua dan Maluku, KOBUMI kini mengelola dua gudang utama:

- Sorong, yang berfokus pada produk perikanan; dan
- Ambon, yang berfokus pada hasil hutan bukan kayu seperti rempah-rempah.

Seluruh komoditas yang dikelola di gudang KOBUMI berasal langsung dari petani dan masyarakat lokal. Produk-produk ini kemudian diolah dan diseleksi sesuai standar mutu untuk meningkatkan nilai tambah sebelum dipasarkan ke pembeli nasional dan internasional.





Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

28



29

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua

Ekowisata Berbasis Komunitas di Raja Ampat

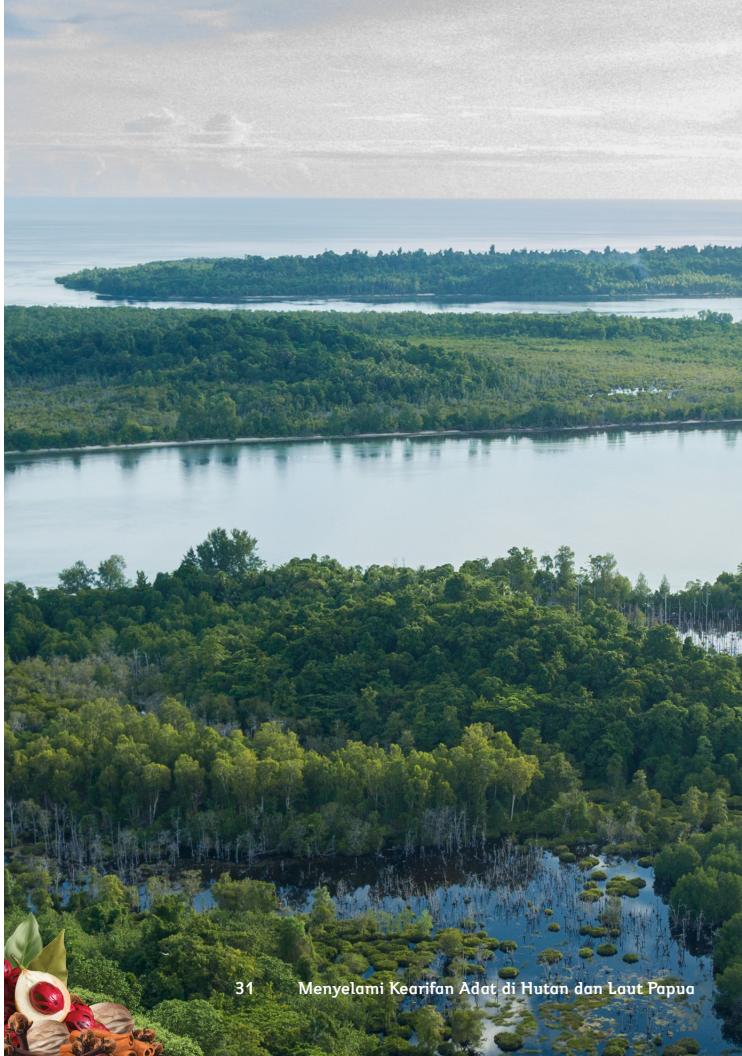
Tahun ini menandai tahun keempat pelaksanaan **Program EcoFund** dari EcoNusa—sebuah program dana bergulir yang mendukung pengelolaan homestay di **Raja Ampat**. Program ini bukan sekadar inisiatif ekonomi, tetapi juga strategi untuk mengintegrasikan **konservasi lingkungan dan pembangunan masyarakat** di kawasan timur Indonesia.

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sempat melumpuhkan sektor pariwisata di Pulau Raja Ampat. Banyak homestay—tulang punggung ekonomi masyarakat—rusak dan tak lagi dapat digunakan. Saat pariwisata mulai pulih, EcoNusa hadir melalui **EcoFund**, memberikan dana bergulir untuk merenovasi dan membangun kembali homestay. Hingga kini, **25 homestay** telah mendapat dukungan, memungkinkan masyarakat Batanta kembali menyambut wisatawan.

Dukungan EcoFund meliputi:

- **Pelatihan Pengelolaan Homestay:** Masyarakat lokal dibekali pengetahuan tentang standar layanan, kebersihan, dan pengelolaan homestay ramah lingkungan.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Dana bergulir membantu homestay di Batanta kembali beroperasi sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
- **Pemberdayaan Perempuan:** Program ini juga melatih kelompok perempuan dalam pertanian organik. Hasil panen kemudian dipasok ke homestay dan resor, menciptakan peluang pendapatan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pengelola homestay, petani organik, dan nelayan lokal menciptakan rantai ekonomi yang saling terhubung. Sayuran segar dari kebun organik dan ikan hasil tangkapan nelayan kini memasok homestay, menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa ketergantungan besar pada investasi eksternal.



Selain homestay, EcoFund juga memperluas dukungan ke koperasi lokal. Salah satunya adalah koperasi di Kampung Pam, Kepulauan Fam, yang dikelola masyarakat adat dan bergerak di produksi **kopra hitam**. Melalui EcoFund, koperasi diberi kesempatan untuk mengoptimalkan dana guna memperkuat kegiatan pengadaan dan penjualan, menghasilkan keuntungan, dan memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat **keberlanjutan usaha lokal**, tetapi juga menegaskan peran **koperasi** sebagai wadah bagi kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang berpihak pada masyarakat.

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua



Konservasi Ekosistem Mangrove

Selain mendukung operasional homestay, EcoFund juga berperan penting dalam upaya **pelestarian ekosistem mangrove**. Mangrove memiliki peran vital dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menyediakan habitat alami bagi biota laut, serta menyerap karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim.

Upaya konservasi mangrove melalui EcoFund meliputi:

- **Pemetaan Wilayah Adat:** Membantu masyarakat adat memetakan dan mengamankan hak kelola wilayah pesisir secara berkelanjutan.
- **Pelatihan dan Pemberdayaan:** Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove serta mendorong partisipasi aktif dalam rehabilitasi.

Sinergi antara konservasi mangrove dan pengembangan homestay berbasis komunitas telah membawa hasil nyata:

- **Pelestarian Lingkungan:** Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga mangrove, yang berujung pada keterlibatan aktif dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan.
- **Pertumbuhan Ekonomi Lokal:** Diversifikasi sumber pendapatan dari homestay, pertanian organik, dan ekowisata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sekaligus mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang merusak lingkungan.
- **Penguatan Kelembagaan Komunitas:** Pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan secara mandiri.

Raja Ampat dengan kekayaan alam dan tanah yang subur, kini menjadi contoh cemerlang bagaimana masyarakat adat dapat mencapai **kemandirian ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan**. Dari homestay yang kembali hidup hingga hutan mangrove yang lestari, kisah Batanta membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, masyarakat adat dapat menjadi **penjaga utama masa depan mereka sendiri**.



Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua



Doberai Lounge dan Galeri

Merayakan Keindahan Papua Melalui Karya dan Cerita

Doberai lahir dari semangat untuk merangkul dan memperkenalkan kekayaan Papua kepada dunia. Dikelola oleh Koperasi Keik Boson Kamwaris, Doberai menjadi ruang di mana setiap produk memiliki cerita. Di sini, berbagai karya diciptakan oleh tangan-tangan terampil masyarakat adat Papua, menggunakan bahan alami yang tumbuh subur di tanah leluhur mereka.

Nama Doberai terinspirasi dari Semeranjung Burung (Bird's Head Peninsula), salah satu dari tujuh wilayah adat Papua. Wilayah yang kaya keanekaragaman hayati dan dihuni oleh beragam suku adat ini tercermin dalam setiap produk yang dipamerkan di galeri—menjadi simbol warisan budaya dan identitas Papua.

Membeli produk di Doberai berarti turut memberi dampak positif. Keuntungan dari setiap penjualan dikembalikan langsung kepada komunitas Papua, membantu mereka melestarikan tradisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan.





Papua: Dari Alam untuk Masa Depan

Dari pesisir Malaumkarta hingga hutan Konda, dari homestay di Raja Ampat hingga galeri Doberai, satu pesan bergema kuat: masa depan Papua dibangun dari tangan-tangan masyarakat adatnya sendiri. Melalui pengetahuan leluhur, solidaritas komunitas, dan semangat menjaga bumi, masyarakat adat menunjukkan bahwa pembangunan sejati tidak harus merusak alam—ia dapat tumbuh dari harmoni dengan alam.

Hutan, laut, dan tanah Papua bukan sekadar sumber daya; mereka adalah sumber kehidupan, kebanggaan, dan identitas. Inisiatif seperti KOBUMI, EcoFund, dan Doberai memperlihatkan

bahwa ketika masyarakat diberikan kepercayaan dan dukungan, mereka mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan serta ekonomi yang tumbuh tanpa kehilangan jati diri budaya, teknologi yang berpihak pada manusia, dan alam yang tetap menjadi rumah bagi semua makhluk hidup.

Papua adalah cermin masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Sebuah masa depan di mana kearifan lokal menjadi dasar inovasi, dan di mana pembangunan tidak lagi diukur dari seberapa banyak yang diambil dari bumi, tetapi seberapa banyak yang dijaga untuk generasi berikutnya.

Menyelami Kearifan Adat di Hutan dan Laut Papua 34

ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

Jl. Kaliele, No. 4, RT 01/RW 02, Kel. Malaingkedi,
Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98412.

Jakarta Representative Office:
Jl. Irian No.5, RT.8/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Email: kantor@econusa.id
Website: econusa.id

KOBUMI
Finest Goods of The Eastern Paradise

Dermaga Usaha Mina, Jl. Ahmad Yani, Kp. Baru,
Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98411

Gudang Produksi Amboin:
Jl. Y. Syaranamual, Hunuth/Durian Patah, Kec. Teluk. Amboin, Kota Amboin, Maluku, 97233

sales@kobumi.id +62-811-166-4788
www.kobumi.id
[in](#) KOBUMI Indonesia [kobumi.id](#)



PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEP. RAJA AMPAT

SYAFRI,
BLUD UPTD KKP KEP. RAJA AMPAT

- # Zero waste
- # No anchor
- # Nyaman berwisata
- # Jaga laut
- # Blud UPTD kkp rj4

Pertemuan Dengan Delegasi BKSAP DPR RI
Hotel Korpak Waisai, 13 Nopember 2025

PROFIL KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEP. RAJA AMPAT



Kawasan konservasi perairan yang terletak di jantung segitiga karang dunia, tertinggi keanekaragaman biota lautnya, serta terbaik pengelolaannya



Terdiri dari 7 Area, dengan luas kawasan 1,6 juta Ha lebih. Terdapat lebih dari 100 diving point yang keindahannya terkenal di dunia, 570 lebih jenis karang, 1600 lebih jenis ikan



Jumlah staf sebanyak 90 org, tersebar di kantor & 12 pos lapangan di 7 area kawasan



Mendapat pengakuan dari Marine Conservation Institute pada event BLUE PARK AWARD dengan kategori "GOLD" untuk pengelolaan kawasan



Salah satu Kawasan yang dikelola berkelanjutan dari 127 kawasan konservasi perairan di Indonesia dengan kategori "EMAS"



Anda dapat belajar bagaimana berpatroli dalam kawasan, memonitoring sumberdaya laut



Anda dapat belajar dari masyarakat bagaimana memandu selam, membuat anyaman topi, noken dari bahan lokal, membatik dengan getah dedaunan, membuat produk sabun dan turunannya dari kelapa



BLUD UPTD Pengelolaan
Kawasan Konservasi di Perairan
Kepulauan Raja Ampat



REGULASI

1. **Kepmen KP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat;**
2. **Kepmen KP Nomor 191 Tahun 2023 Tentang Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Misool Utara Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya;**
3. **Permen KP 31/2020 Tentang pengelolaan Kawasan Konservasi;**
4. **Permen KP Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;**
5. **Permen KP Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;**
6. **Permendagri No 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;**
7. **Kepgub PBD Nomor 100.3.3.1/174/10/2023 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;**
8. **Pergub PBD Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas P2KP;**
9. **Pergub PBD Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;**
10. **Pergub PBD Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tarif Layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;**
11. **Pergub PBD Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Remunerasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;**
12. **Pergub PBD Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Hibah untuk BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja Ampat;**

PENGELOLAAN KKP

KKP : 1,6 jt
Ha

- Upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan
- Potensi pemanfaatan cukup terbuka & besar
- Butuh biaya operasional relative besar
- Butuh keberlanjutan pengelolaan
- Butuh tatakelola yg efektif efisien

SUOP
(UPTD)

- Membantu Kadis dlm melaks. Tugas teknis perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian pd KKP Kep. Raja Ampat
- Pelaksanaan perlindungan terhadap habitat dnn jenis ikan serta biota lainnya;
- Pelaksanaan monitoring sumber daya kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, pengendalian ("Pengawasan") terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Perlindungan terhadap sistem zonasi di Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat

SK Gub PBD 100.3.3.1/174/10/2023
Tentang Penerapan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) KKP Kep. Raja Ampat

PPK
BLUD

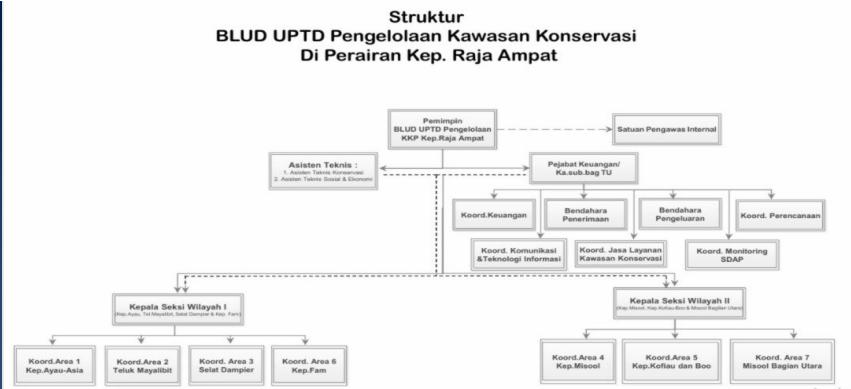
- DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM:**
- Menyelenggarakan layanan pungutan/ tarif masuk KKP;
 - Fleksibilitas dlm pengelolaan anggaran;
 - Ketergantungan pd APBD/APBN berkurang;
 - Potensi PAD terbuka
 - Perekruit SDM dpt dilakukan sesuai kebutuhan & keahlian;
 - Dapat bekerjasama dgn pihak lain;
 - Terbuka kesempatan dlm menerima grant/hibah;
 - Pengembangan Blue economy terbuka peluang

YANG HARUS DILAKUKAN:

- Penyiapan rencana pengelolaan;
- Melaksanakan pemantauan & pengendalian via patroli jaga laut;
- Pelaksanaan pemantauan sumberdaya laut, jenis & habitat;
- Pengelolaan situs pemanfaatan;
- Penyelenggaraan layanan pemeliharaan jasa lingkungan bagi pengguna kawasan;
- Penyediaan sarpras pengelolaan;
- Penyiapan aturan, SOP/CoC pemanfaatan;

MEMBUTUHKAN:

- Keberlanjutan pembiayaan;
- Butuh biaya operasional yg besar, APBD terbatas;
- Butuh SDM/staf yg memadai;
- Butuh pelayanan, respon & tindakan yg cepat;
- Butuh sarpras yg memadai;



GELAR PASUKAN JAGA LAUT KE 7 AREA KAWASAN

- KANTOR &
POS LAYANAN**
1. POS AYAU
 2. POSTELMA
 3. POS YENADWAK
 4. POS YENBEKWAN
 5. POS MANTA
 6. POS MIOS KOOR
 7. POS HARJA, MISEL
 8. POS KALEG, MISEL
 9. POS KASIM, MISUT
 10. POS PULPULO, MISUT
 11. POS KOFIUAU
 12. POS BANTU WAYAG
 13. POS LAYANAN TLPJL
PELKAN SRG
 14. POS LAYANAN TLPJL
PELRA SRG



PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KKP

1. Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan
2. Blue Abadi Fund (BAF)
3. Walton Family Foundation (WFF)
4. Konservasi Indonesia (KI)
5. Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
6. APBD



Menyelenggarakan
Jasa Layanan
dalam Kawasan
Konservasi

Akan dirubah sesuai Pergub PBD
Nomor 32 Tahun 2024 Tentang
Tarif Layanan (Jasa Layanan
Kawasan Konservasi-JALASASI)

SK Gub PBD
100.3.3.1/174
/10/2023
Tentang
Penerapan
Pola
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
Daerah
(BLUD)

Tarif Jasa Layanan saat ini:

Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan sebesar:

- Internasional /Peneliti Internasional Rp. 700.000/org/thn
- Domestik/ Peneliti domestik Rp. 425.000 org/thn

Tarif Jasa Layanan mendatang:

- Wistawan Domestik ber KTP PBD Rp.150.000/org/thn
- Wistawan Domestik selain ber KTP PBD yang ada di tanah Papua Rp. 250.000/org/thn
- Wisatawan Domestik/ Peneliti domestik Rp. 500.000 /org/thn
- Wisatawan Internasional /Peneliti Internasional Rp. 1.000.000 /org/thn
- Layanan labuh tambah (mooring) & titik labuh Rp. 75.000.000 / kapal/ tahun
- Sport fishing Rp. 2.500.000/kapal/kunjungan

EKONOMI BIRU

Pengelolaan &
pemanfaatan/eksploitasi
SDL KKP secara
berkelanjutan,
mendorong pertumbuhan
ekonomi, lapangan
kerja terbuka,
kesejahteraan masyarakat,
kelestarian SDL tetap terjaga



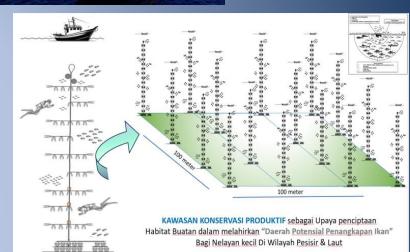
WISATA BAHARI

PERIKANAN

LABUH TAMBAT

SPORT FISHING

- Perikanan & akuakultur
- Wisata bahari
- Energi terbarukan
- Transportasi maritim
- Bioteknologi



PENGGUNA JASLING

- Homestay; ± 200 unit
 - Resort; ± 30 unit
 - Kapal wisata; 205 kapal
 - Spot selam 160an
 - Dive center ± 15
 - Pemandu wisata 163
 - Pekerja homestay ± 780

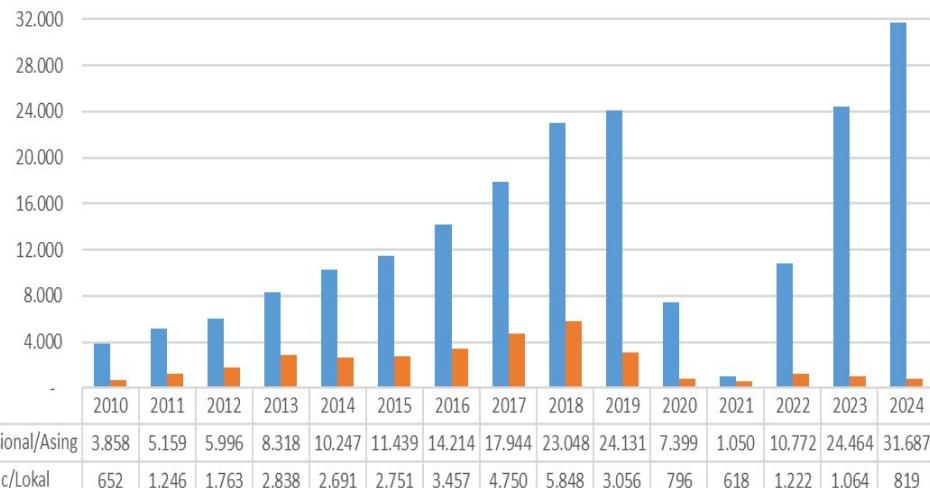


E-card



Jumlah Pengguna KKP (Wisata Bahari) Raja Ampat

Tahun 2010 - 2024



Website: kkprajaampat.com

PANTAU KENDALI PENGAWASAN PEMANFAATAN HABITAT PENTING



Deployment rumah ikan di area iv misool Selatan (13-14 Agustus 2025)

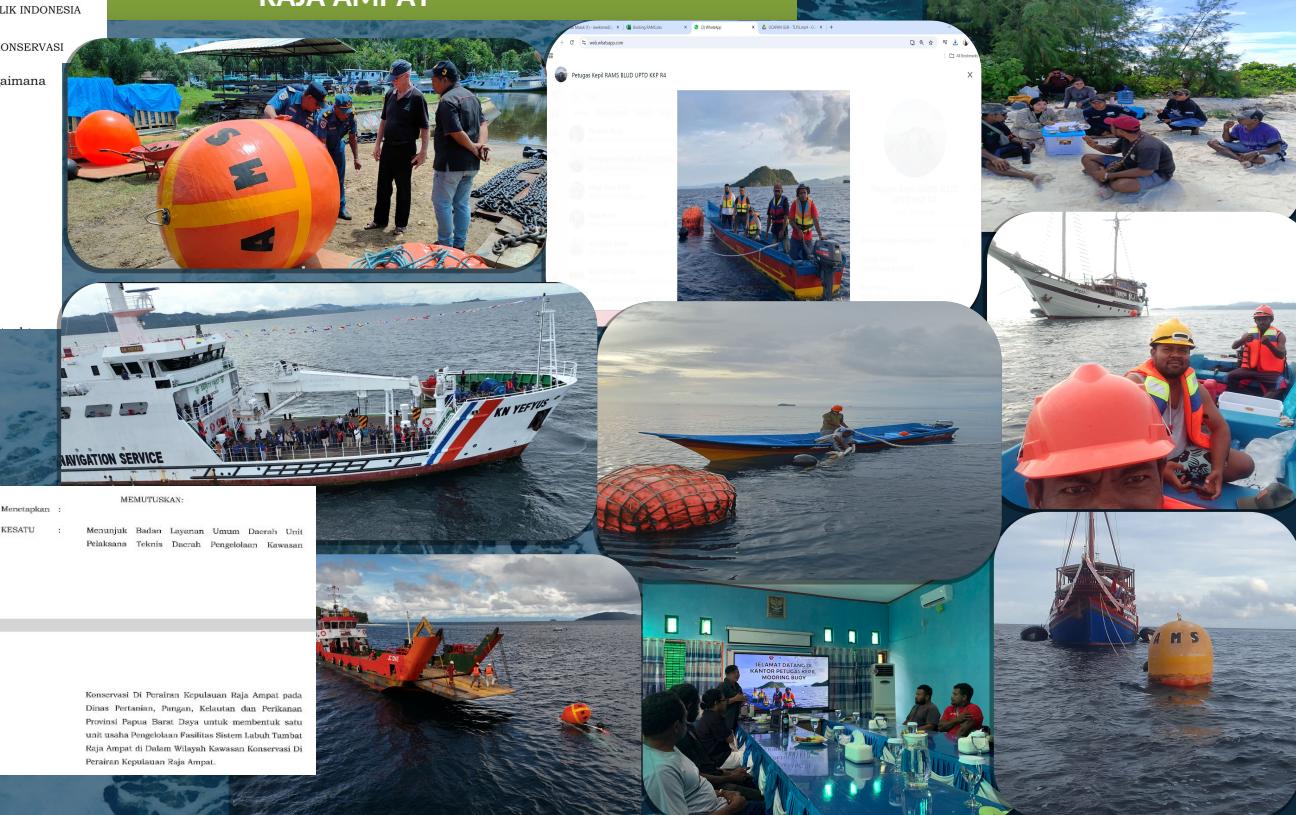


PENYEDIAAN MOORING SARANA LABUH TAMBAT KAPAL, PENYIAPAN SDM PETUGAS KEPIL BAGI KAPAL WISATA DI KKP KEP. RAJA AMPAT

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 3

- (1) Infrastruktur di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- mobilitas;
 - pemantauan target konservasi;
 - informasi;
 - rehabilitasi;
 - keselamatan;
 - penanda di Kawasan Konservasi;
 - tambat Kapal;
 - laboratorium konservasi;
 - pelayanan masyarakat;
 - pameran koleksi;
 - peningkatan kapasitas masyarakat;
 - basis data Kawasan Konservasi;
 - pengolahan data;
 - perkantoran; dan/atau
 - pengawasan.



PENTING PENGADAAN SARANA TAMBAT

Timeline pengadaan mooring bouy biaya mandiri BLUD UPTD KKP

- Mooring sebagai bagian alat pantau kendali pengguna kawasan konservasi
 - Dibutuhkan setidaknya pada 170 titik
 - Telah selesai disurvey di 56 titik tersebar di 3 Area kawasan konservasi
 - 1 mooring untuk 2 – 4 situ selam
 - Setiap situ selam diatur penggunaan untuk pengguna homestay + resort + LoB
 - Terlarang bagi LoB/kapal buang jangkar dalam kawasan



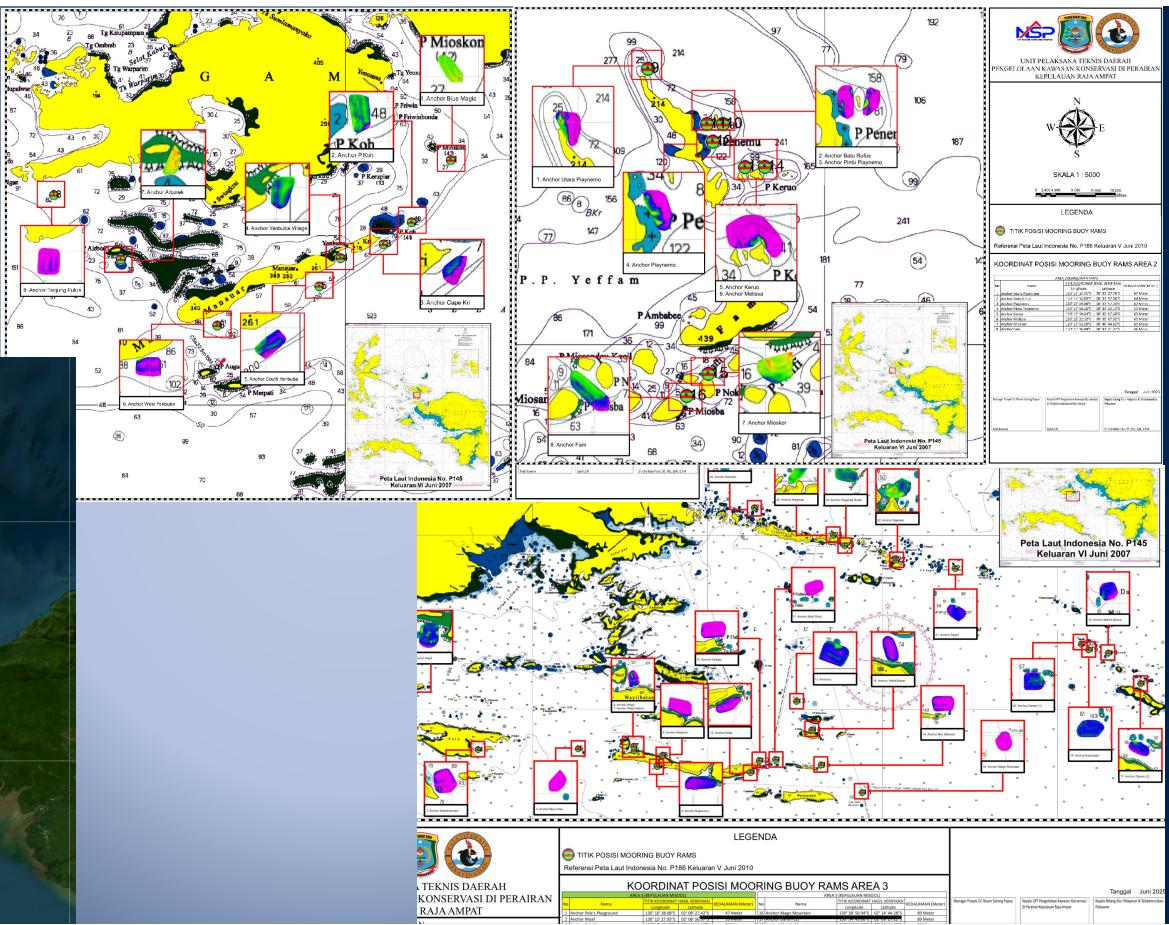
**8 unit mooring dibiayai
oleh Yayasan Konservasi
Indonesia th 2024/2025**



27 Apr 2025 15.29.49
BLUD UPTD KKP Raja Ampat

RENCANA PENEMPATAN MOORING BOUY Th 2025:

- 4 UNIT DI AREA III SEL.
DAMPIER
 - 4 Unit di Area VI Kep.
Fam
 - 6 Unit di Area IV Misool
Bag. Selatan



TERIMA KASIH

MEMBANGUN DENGAN HATI, MEMERSATUKAN DALAM KASIH





KEBIJAKAN DAERAH DAN INTEGRASI KONSERVASI LAUT

Absalom Solossa, S.Pi., MM

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan



GAMBARAN UMUM Provinsi Papua Barat Daya

Dasar Hukum

Provinsi Papua Barat Daya dibentuk berdasarkan **UU Nomor 29 Tahun 2022** pada tanggal **9 Desember Tahun 2022**



Jumlah
Penduduk
627.127



OAP : 42,57%
NON OAP: 57,63%

Luas
Wilayah (Km²)
39.122,95



Geopolitik dan Geostrategis

- Berada diantara 2 Benua (Asia dan Australia)
- Menjadi serambi Indonesia untuk Indopasifik
- Menjadi Hub Asia-Australia-Indopasifik
- Jarak Sorong-Palau 1.003 Km
- Jarak Sorong-Sidney 4.214 Km
- Jarak Sorong-Tokyo 4.184 Km
- Jarak Jakarta-Sidney 5.493 Km

Jumlah
Pulau
3.023



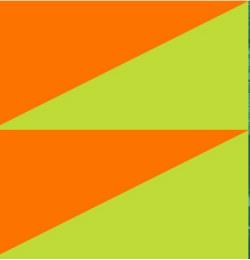
5
Kabupaten

1
Kota





Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya



Permasalahan Provinsi Papua Barat Daya

A. Bidang Sosial dan SDM

- ❑ Belum optimalnya ketersediaan akses dan kualitas layanan pendidikan
- ❑ Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- ❑ Belum optimalnya kesetaraan gender
- ❑ Belum optimalnya kesejahteraan PPKS
- ❑ Masih tingginya potensi konflik sosial

B. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi Provinsi Papua Barat Daya

- ❑ Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian belum optimal;
- ❑ Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian belum merata ;
- ❑ Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian terhadap perekonomian belum optimal;
- ❑ Pertumbuhan Ekonomi
- ❑ Stunting

C. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- ❑ Konektivitas antar wilayah belum optimal Pengelolaan air bersih dan sanitasi belum optimal;
- ❑ Ketersediaan rumah layak huni yang berkelanjutan belum optimal ;
- ❑ Infrastruktur perhubungan dan transportasi antar moda belum optimal;
- ❑ Penyelenggaraan urusan pertanahan belum optimal;
- ❑ Akses ketenagalistrikan belum optimal;
- ❑ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

D. Permasalahan Pembangunan Bidang Tata Kelola Provinsi Papua Barat Daya

- ❑ Profesionalitas birokrasi belum optimal;
- ❑ Sistem perencanaan daerah belum optimalBelum optimalnya kesejahteraan PPKS;
- ❑ Sistem pengawasan intern pemerintah belum optimal;
- ❑ Pemerintahan daerah belum optimal

Isu Strategis



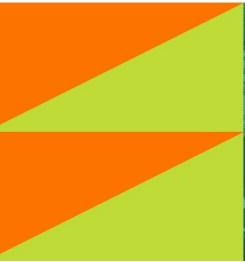


Pemerintah
Provinsi Papua Barat Daya



Visi, Misi dan Program Prioritas

Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029



GRAND DESAIN, KONSEP VISI DAN MISI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2025-2029

Visi Jangka Panjang
Papua Barat Daya 2025-2045

“Papua Barat Daya Sebagai Gerbang Tanah Papua Yang Maju dan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Biru”

Visi

“Masyarakat Papua Barat Daya Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan”

Misi

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan berbasis e-Government;
3. Mewujudkan pembangunan konsep Kota Cluster dalam provinsi berbasis wisata, industri dan UMKM;
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif melalui kerjasama antar daerah-negara;
5. Mewujudkan pembangunan melalui jalur konektivitas wilayah sebagai basis pertumbuhan ekonomi.



ELISA KAMBU, S.So

AHMAD NAUSRAU, S.Pdi, MM

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

2028-2029

2025-2026

2025

2027-2028

Fokus : Keamanan dan
konektivitas wilayah

Fokus : Pembangunan dan
pengembangan Kota Cluster
dalam Provinsi berbasis
wisata dan UMKM

Fokus : Penataan Tata Kelola
pembangunan yang maju
inovatif dan berdaya saing

Fokus : SDM Papua Barat
Daya yang maju dan inovatif

Pembangunan infrastuktur dan peningkatan
akses pelayanan publik dasar guna
meningkatkan pemerataan pembangunan

8 Program Prioritas Daerah 2025-2029

1. Penurunan angka kemiskinan dan stunting;
2. Pembangunan Pendidikan berbasis inovasi daerah;
3. Peningkatan kualitas Kesehatan;
4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar (penataan Kawasan perkotaan cluster dalam provinsi);
5. UMKM digital berbasis inovasi dan ekonomi kreatif;
6. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
7. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keamanan wilayah melalui harmoni sosial



Pemerintah
Provinsi Papua Barat Daya



Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029



Tujuan dan Sasaran pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

Meningkatnya kualitas SDM
Papua Barat Daya

Meningkatnya kesejahteraan
masyarakat

Meningkatnya pusat-pusat
perekonomian, potensi
karakteristik serta keunggulan
lokal Papua Barat Daya melalui
Kota Cluster dalam Provinsi
Wisata berbasis industry UKM

Meningkatnya perekonomian
PBD melalui Inovasi Daerah dan
Kerja Sama

Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup



Strategi dan Arah Kebijakan

Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
01	02
<p>Misi 1. Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Inovatif Berbasis Modal Sosial Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan Pendidikan</p>	<p>Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar</p> <p>Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center)</p> <p>Penguatan pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) serta pendidikan dan pelatihan vokasi</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</p> <p>Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, serta penguatan sekolah terbuka</p> <p>Percepatan pembangunan afirmasi untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang</p>
<p>Penguatan pola pendidikan sesuai kewenangan berbasis komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p>	<p>Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi, sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p> <p>Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik</p> <p>Jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik</p> <p>meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p> <p>Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lainnya) lembaga adat, dan lembaga sosial</p>

Afirmasi pendidikan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan
Pelayanan kesehatan bergerak	<p>Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>pemenuhan sarana prasarana pendukung seperti jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis, serta pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses</p>
Peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	<p>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah</p> <p>Edukasi kesehatan ibu anak, reproduksi, KB, gizi Masyarakat</p>
perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal	<p>Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi</p> <p>peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan</p> <p>perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu</p> <p>Peningkatan akses dan kualitas pelayanan rumah layak huni</p>
perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM social	bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
Meningkatkan penguatan satu data agar agar tepat sasaran penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan	<p>Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)</p> <p>Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata</p>

Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kelembagaan Berbasis E Goverment

Peningkatan kualitas Tata kelola Pemerintahan	<p>Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dan peningkatan sarana prasarana pendukung</p> <p>Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah</p> <p>Penguatan tata kelola perencanaan pembangunan</p> <p>Peningkatan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan maupun pengelolaan keuangan</p>
Peningkatan kualitas manajemen organisasi pemerintah PBD	penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah
Penguatan peran pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi	Optimasi dan harmonisasi regulasi
Peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan publik	<p>Pengembangan smart government</p> <p>pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan</p> <p>peningkatan layanan perizinan berbasis digital</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik</p> <p>Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan</p> <p>manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah</p>
Peningkatan efektivitas pengelolaan Otsus (OAP dan Non OAP)	<p>Meningkatkan pembangunan kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung</p> <p>Penguatan kapasitas distrik dan kampung dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>Penguatan sinergi antar lembaga dan antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang berorientasi kepada OAP</p> <p>Penguatan sinergi antar lembaga dan antar pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang berorientasi kepada OAP</p> <p>Penguatan kohesi sosial OAP dan pendatang</p> <p>pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru</p>

Partisipasi dalam musrenbang	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat	
	Penguatan integritas partai politik	
	penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat serta optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial	
	Penegasan batas-batas wilayah	
	Penerapan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	
	Peningkatan pelayanan informasi kebencanaan	
	Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	
	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara	
Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Penguatan pengendalian inflasi daerah	
	peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU dan CSR	
	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama, peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan perlakuan bagi tokoh adat dan agama	
	Misi 3. Mewujudkan Pembangunan "Kota Cluster dalam Provinsi Berbasis Wisata Industri-UMKM".	
	Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang dan penguatan sentra produksi berbasis rumput laut

serta kota industri, perdagangan, dan jasa	Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah; melalui penguatan sentra produksi; pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor
	Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang dan penguatan sentra produksi berbasis rumput laut
	peningkatan aksesibilitas pariwisata, pengembangan atraksi, dan amenitas pariwisata, pengembangan keterampilan SDM dan usaha masyarakat, perluasan pemasaran pariwisata
	peningkatan kualitas sdm dan pendampingan pengembangan industry
	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda
	Mengembangkan sentra tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha.
	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi hortikultura serta kelautan dan perikanan.
	Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.
	Mengembangkan pusat industri, perdagangan dan jasa berskala internasional
	Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta pusat pelayanan primer dan sekunder
Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata	Pengembangan agropolitan dengan potensi tanaman pangan kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar
	Pengembangan potensi simpul perdagangan
	Pengembangan sektor perikanan
	Dukungan optimalisasi KEK Sorong

	<p>Pengembangan industri pengolahan</p> <p>Penguatan sebagai pusat kegiatan nasional (simpul transportasi nasional, simpul kegiatan regional, dan pusat jasa keuangan).</p> <p>Pengembangan potensi perikanan, serta peternakan sapi, ayam, dan babi</p> <p>Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi</p>
peningkatan pemanfaatan teknologi digital	penguatan pemberdayaan UMKM
Peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	<p>Penguatan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global,</p> <p>Peningkatan kerja sama regional</p> <p>Pengembangan sentra produksi pangan dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal</p>
Misi 4. Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Kerjasama Antar Daerah-Negara	
	<p>Membangun sarana dan prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi</p> <p>Penguatan industri pariwisata dan kelautan berbasis ekowisata dan masyarakat, serta bertaraf internasional</p> <p>Pengembangan potensi budidaya mutiara, tanaman pangan sagu, perkebunan kelapa</p> <p>Dukungan optimalisasi KEK Sorong</p>

	<p>Dukungan optimalisasi KEK Sorong</p> <p>Pengembangan potensi tanaman pangan padi, sagu, perkebunan kelapa, kelapa sawit, perikanan, peternakan sapi, dan ayam</p> <p>Peningkatan pemberdayaan ekonomi</p>
optimalisasi kawasan strategis eksisting	<p>Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan</p> <p>penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan</p>
Pengembangan pariwisata berkelanjutan	<p>peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata</p> <p>Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari</p> <p>Peningkatan produktivitas BUMD</p> <p>Penguatan sentra produksi komoditas udang dan rumput laut serta sentra industri komoditas udang</p>
	Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT
Misi 5. Mewujudkan Pembangunan berkesinambungan melalui Jalur Konektivitas Wilayah Sebagai Basis Pertumbuhan Ekonomi	
Peningkatan jaringan infrastruktur secara terpadu	<p>peningkatan jalan</p> <p>pengembangan pelabuhan</p> <p>jaringan pelayaran,</p>

	<p>pengembangan bandara</p> <p>pemenuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan</p> <p>peningkatan infrastruktur pembangkit listrik</p> <p>peningkatan infrastruktur digital dan TIK</p>
peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, serta sarana dan prasarana dasar perkotaan	<p>Optimalisasi Ayamaru sebagai simpul wilayah</p> <p>Optimalisasi Terminabuan sebagai simpul wilayah</p> <p>Pengembangan Pelabuhan Sorong</p> <p>Penyediaan air baku di KEK Sorong</p> <p>Pembangunan Pelabuhan</p>
pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, Pembangunan ketenagalistrikan	<p>Perbaikan sarana dan prasarana perkotaan sehingga menjadi kota layak huni</p> <p>pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia</p> <p>pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>) untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik</p> <p>pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik</p> <p>Pembangunan dan memenuhi kebutuhan air masyarakat</p>

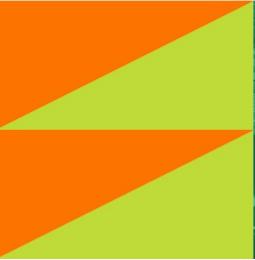
	<p>Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan</p> <p>Peningkatan akses perumahan layak dan terjangkau yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat</p> <p>Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan Daerah Otonom Baru untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik</p> <p>Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah</p> <p>Peningkatan konektivitas dan akses pelayanan dasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan</p> <p>Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa</p> <p>Penuntasan RDTR kabupaten/kota</p>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan di PBD	<p>pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim</p> <p>Pelestarian Kawasan konservasi</p> <p>Pembangunan wilayah/infrastruktur yang memerhatikan/mempertahankan kawasan konservasi</p>
Penguatan lingkungan yang inklusif	<p>Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulaupulau kecil secara berkelanjutan, penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing</p> <p>peningkatan kelestarian adat dan lingkungan</p> <p>Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir</p> <p>permukiman kumuh</p> <p>Peningkatan konservasi dan rehabilitasi, serta pencegahan dampak negatif pemanfaatan SDA</p>



Pemerintah
Provinsi Papua Barat Daya



Tantangan dan Peluang Pembangunan Daerah



Kemiskinan & ketimpangan.

Akses pendidikan &
kesehatan belum merata.

Infrastruktur terbatas di
wilayah pedalaman/pesisir.

Tekanan eksploitasi hutan &
laut.



Tantangan Utama

“Dalam perjalanan membangun Papua Barat Daya, tentu tidak semua berjalan mulus. Ada sejumlah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Tantangan inilah yang justru akan menjadi tolok ukur seberapa kuat komitmen dan strategi pembangunan kita.”

Peluang Besar



Di balik tantangan yang kita hadapi, Papua Barat Daya justru menyimpan peluang besar. Potensi alam yang luar biasa, dukungan kebijakan nasional, hingga kekuatan masyarakat lokal adalah modal berharga yang bisa kita kelola untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.”



Dana Otsus & afirmasi pembangunan nasional.

Kolaborasi multipihak (pemerintah, ormas, akademisi, adat).

Potensi SDA & ekowisata dunia.

Momentum DOB untuk tata kelola baru.



Terima Kasih



Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya

MEMBANGUN DENGAN HATI, MENYATUKAN DALAM KASIH



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id
Phone: (62-21) 5715813
ksap.dpr.go.id

